

ANALISIS HUKUM PIDANA & NILAI PANCASILA (STUDI KASUS : APLIKASI BINARY OPTION / BINOMO)

Natasha Olivia Aliza¹, Columbanus Priaardanto², Enjelina Sibatuara³
Achmad Fachri Fadlullah Salis⁴, Lorentz Levanone⁵

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: natashaolivia.untar@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: danto@imm.co.id

³Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: enjellsummerlee@gmail.com

⁴ Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: fahrisalis@gmail.com

⁵ Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: Levarentz2001@gmail.com

ABSTRACT

The ease of accessing the internet for the community does have a good impact, but unfortunately this ease of access without being equipped with knowledge, especially in the investment field, is a separate obstacle. Online investment has become a trend in society in the midst of technological developments, convenience and increasingly sophisticated investment services, making the attraction of online investment soaring very high. This is because people adapt quickly to new technologies, and as a result they will invest their money online more often.

The article entitled Analysis of Criminal Law & Pancasila Values (Case Study: Binary Option/Binomo Application) was written using normative legal research methods. All information has been collected and analyzed through a case approach which is useful for gaining an understanding of the problem being studied. As a living being, it is important to have a guideline that becomes a benchmark in carrying out all actions, with the Pancasila values in one's life will increase morality and decency. The second Pancasila precept is very important to prevent humanitarian crises and preserve universal values. This principle is important to ensure that the law is applied fairly to all to respect human rights. The principles outlined in the second principle will protect the rights of those who are harmed by illegal investment practices such as the Binomo case. Legally, online fraud that cannot be accounted for can be prosecuted under Article 378 of the Criminal Code, Article 45 paragraph (2) of the ITE Law, and Article 28 section (1).

Keywords: Investment; Binary Option, Pancasila

ABSTRAK

Kemudahan dalam mengakses internet bagi kalangan masyarakat memang berdampak baik, namun sayangnya kemudahan dalam pengaksesan ini tanpa di bekali dengan pengetahuan terutama dalam bidang investasi, menjadi kendala tersendiri. Investasi online telah menjadi tren dalam masyarakat di tengah perkembangan teknologi, kemudahan dan pelayanan dalam berinvestasi yang semakin canggih membuat daya tarik terhadap Investasi online menjulang sangat tinggi. Hal ini terjadi karena orang cepat beradaptasi dengan teknologi baru, dan sebagai hasilnya mereka akan lebih sering menginvestasikan uang mereka secara online.

Artikel yang berjudul Analisis Hukum Pidana & Nilai Pancasila (Studi Kasus: Aplikasi Binary Option/ Binomo) ditulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, Semua informasi telah dikumpulkan dan dianalisis melalui pendekatan kasus (*case approach*) yang berguna untuk mendapatkan pemahaman atas masalah yang diteliti. Sebagai makhluk hidup penting adanya suatu pedoman yang menjadi tolak ukur dalam melakukan segala perbuatan, dengan adanya nilai Pancasila dalam kehidupan seseorang akan meningkatkan moralitas dan kesusilaan. Sila pancasila kedua sangat penting untuk mencegah krisis kemanusiaan dan melestarikan nilai nilai universal. Prinsip ini penting untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil kepada semua orang untuk menghormati hak asasi manusia. Prinsip yang digariskan dalam sila kedua akan melindungi hak-hak mereka yang di rugikan akibat praktik investasi ilegal seperti kasus Binomo. Secara hukum, penipuan online yang tidak bisa di pertanggungjawabkan dapat dituntut berdasarkan pasal 378 KUHP, pasal 45 ayat (2) UU ITE, dan pasal 28 ayat (1).

Kata Kunci: Investasi; Binary Option; Pancasila

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kejahatan penipuan investasi sering terjadi. Seiring bertambahnya waktu, semakin banyak peluang untuk aktivitas penipuan oleh individu yang ceroboh menjadi jelas. Penawar investasi memanfaatkan inovasi teknis yang semakin canggih, bersama-sama disebut sebagai investasi *online*, untuk membuat kegiatan investasi menjadi lebih mudah dan lebih layak. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa individu cenderung mudah beradaptasi dengan teknologi baru, dan akibatnya, mereka akan lebih cenderung menginvestasikan uang mereka secara *online*. Penawar investasi akan menggunakan lebih banyak variasi strategi untuk menarik minat publik (Singgi et al., 2020).

Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban berarti bahwa setiap orang yang melakukan kejahatan atau perbuatan melawan hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan sifat kejahatan yang dilakukan. Jika badan hukum yang bertanggung jawab atas penipuan tersebut adalah perusahaan, maka harus jelas siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban (Hakim, 2015). Dalam hal penipuan investasi, manajemen perusahaan investasi bertanggung jawab untuk melakukan tindak pidana.

Kasus Binomo yang diyakini sebagai salah satu skema pencucian uang Indra Kenz, semakin dicurigai termasuk penipuan investasi yang dilakukan dengan menggunakan platform aplikasi Binomo. Hal ini saat ini sedang menjadi perdebatan publik pada tahun 2022 karena Indra Kenz adalah individu yang terkenal dan karena banyak orang yang terlibat dalam membangun situs perdagangan Binomo sebagai platform investasi *online* yang terkenal. *Binary Options Trading*, juga disebut perdagangan opsi biner, adalah aktivitas yang menggunakan sistem biner untuk memprediksi bagaimana nilai suatu aset akan berubah selama jangka waktu tertentu. Dengan mengetahui bagaimana harga aset referensi akan berubah dalam jangka waktu tertentu, seseorang dapat menghasilkan sejumlah uang yang telah ditentukan sebelumnya atau kehilangan sejumlah kecil uang yang telah ditempatkan. Investor harus meletakkan sejumlah uang pada platform opsi biner *online* seperti Binomo untuk melakukan deposit. Dari deposit ini, investor dapat "*call*" atau "*put*" untuk melakukan deposit dalam bentuk kontrak terhadap salah satu opsi komoditas yang ditawarkan oleh platform Binomo (Tusyanna, 2022).

Menurut fakta kasus di atas, mencuri uang dari rekening investasi adalah tindakan kriminal dan ilegal. Kasus Binomo bertentangan dengan *poin* kedua dalam Pancasila, yang menyatakan, "Kemanusiaan yang adil dan beradab." Maknanya, hak asasi manusia dijamin bagi setiap warga negara Indonesia, dan tidak ada yang memiliki kekuatan untuk mengambilnya dari mereka (BPIP, 2021). Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia (WNI), setiap individu harus mengakui sesamanya sebagai ciptaan Tuhan dan memperlakukan mereka dengan harkat dan martabat yang selayaknya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan yang telah disampaikan, maka dapat disimpulkan dua permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis nilai Pancasila terhadap pencucian uang pada Binary Option?
2. Bagaimana analisis hukum pidana yang berlaku di Indonesia terhadap pencucian uang pada Binary Option?

2. METODE PENELITIAN

Artikel yang berjudul Analisis Hukum Pidana & Nilai Pancasila (Studi Kasus : Aplikasi Binary Option/ Binomo) ditulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, dan menggunakan data sekunder antara lain adalah peraturan perundang-undangan, teori, putusan pengadilan, serta doktrin para pakar hukum terkemuka. Semua informasi telah dikumpulkan dan dianalisis melalui

pendekatan kasus (*case approach*) yang berguna untuk mendapatkan pemahaman atas masalah yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Nilai Pancasila Terhadap Pencucian Uang pada Binary Option

Sila kedua Pancasila, yang menekankan moralitas dan kesusilaan, harus menjadi pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada satu atau apapun yang akan merugikan manusia jika mereka membela kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila menjelaskan bahwa setiap WNI harus manusiawi, mengandung arti bahwa setiap keputusan dan tindakan yang melibatkan kemanusiaan harus didasarkan pada kesetaraan manusia. Semua orang Indonesia berkewajiban untuk memperlakukan satu sama lain dengan hormat dan bermartabat dalam semua masalah kemanusiaan, sesuai dengan sila kedua Humanisme Pancasila (Listyaningsih & Umam, 2018).

Sila kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," menekankan pentingnya sikap moral sadar diri dan perilaku manusia berdasarkan kapasitas hati nurani manusia dalam kaitannya dengan norma dan budaya. Prinsipnya bersifat *universal*, artinya berlaku untuk interaksi seseorang dengan orang lain dan dunia di sekitarnya. Sila kedua, "Ketuhanan Yang Maha Esa," dibangun di atas yang pertama, dan seterusnya untuk sisa sila Pancasila (Raditya, 2019). Setelah mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa, sudah seyogyanya memberikan hak dan kewajiban kepada manusia sebagai makhluk Tuhan (BPIP, 2021).

Mempraktikkan "kemanusiaan yang adil dan beradab" dalam sila kedua juga berarti memperlakukan masyarakat Indonesia dengan hormat kepada mereka yang diciptakan Tuhan menurut gambar-Nya. Sebagai ciptaan Tuhan, semua manusia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Perbedaan suku, agama, ras, budaya, status sosial ekonomi, atau garis keturunan tidak ada (Gultom, 2016). Masyarakat Indonesia juga menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perlindungan yang sama di bawah hukum memastikan bahwa setiap orang diperlakukan dengan adil. Argumen utama dari studi ini adalah bahwa hak warga negara atas kesetaraan bergantung pada perlakuan yang adil dan setara. Artinya, keadilan dan kesetaraan berjalan beriringan dalam banyak kasus. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa melindungi seluruh WNI adalah hal yang sangat esensial, terlepas dari latar belakang atau identitas mereka (Yuliani & Dewi, 2021).

Dengan mematuhi prinsip kedua, pemangku kepentingan dapat membantu memastikan bahwa masyarakat umum tidak menjadi korban kegiatan ilegal seperti penipuan investasi. Karena banyak orang telah kehilangan sejumlah besar uang mereka di opsi biner perdagangan uang dan menjadi mangsa penipuan, argumen kedua juga menjelaskan kewajiban pemerintah untuk melindungi individu tersebut. Persamaan hak bagi warga negara yang dirampas dan diperlakukan tidak adil harus diwujudkan agar keadilan dapat tercapai. Ketika individu mulai bertindak lebih beradab terhadap satu sama lain, mereka dapat hidup bersama dan berkembang (Surahmi, 2019).

Masyarakat Indonesia perlu mewaspadaikan ancaman tersembunyi di era baru globalisasi ini (Sudrajat, 2016). Untuk melindungi dari krisis kemanusiaan dan untuk melestarikan nilai-nilai kemanusiaan universal, prinsip kedua sangat penting. Untuk tujuan menghormati hak asasi manusia, prinsip ini penting untuk dapat memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil kepada seluruh masyarakat. Jika prinsip-prinsip yang digariskan dalam sila kedua diikuti, mereka akan melindungi hak-hak mereka yang telah dirugikan sebagai akibat dari praktik investasi ilegal, dan mereka juga akan mempertahankan nilai yang melekat pada setiap individu (Yuliani & Dewi, 2021).

Analisis Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia Terhadap Pencucian Uang pada Binary Option

Untuk menipu orang lain, penipuan terjadi ketika individu atau kelompok menciptakan sesuatu yang tampak asli tetapi sebenarnya palsu. Dalam istilah hukum, penipuan adalah praktik menipu

orang lain untuk berpisah dengan uang atau aset lainnya dengan serangkaian kata-kata palsu, nama palsu, atau situasi palsu. Sebagian besar waktu, orang melakukan penipuan untuk menghasilkan uang untuk diri mereka sendiri atau kelompok mereka sendiri sambil menyakiti orang yang mereka tipu. Seseorang yang menjadi korban penipuan kehilangan uang baik secara fisik maupun mental.

Aplikasi Binomo adalah alat perdagangan *online* yang menggunakan strategi opsi biner. Pelaku opsi biner ditugaskan untuk memprediksi apakah harga aset yang dapat diperdagangkan akan naik atau turun selama jangka waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan informasi dari Badan Pengatur Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), aplikasi Binomo telah diberikan waktu dan tanggal terminasi. Kedaluwarsa mengharuskan harga aset dasar berada di sisi yang benar dari harga kesepakatan bagi pedagang untuk menghasilkan uang (Rohman, 2022). Selain Binomo, terdapat beberapa program lain yang juga menggunakan sistem opsi biner. Sistem ini dianggap mirip dengan perjudian. Penipuan *online* seperti kasus aplikasi binomo memiliki standar yang sama dengan penipuan tradisional. Perbedaan utamanya adalah bagaimana tindakan penipuan investasi *online* ini dilakukan khususnya melalui penggunaan sistem elektronik (PC, web, atau aplikasi untuk komunikasi). Akibatnya, penipuan *online* dapat digunakan dengan cara yang sama seperti tindak pidana tradisional yang diatur dalam KUHP (Kurniawati et al., 2021).

R.Sugandhi dalam tafsirnya KUHP mengajukan konsep penipuan setelah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana pemerasan yang terdapat dalam susunan kata pasal tersebut (Sugandhi, 1980):

“Penipuan adalah perbuatan seseorang melalui penipuan, serangkaian kebohongan, nama palsu, dan keadaan palsu dengan maksud memperkaya diri sendiri tanpa hak.” Suite a lie adalah susunan kebohongan yang terdiri dari frasa yang menceritakan kisah sesuatu seolah-olah itu benar.”

Seperti yang dinyatakan diatas, "penipuan" mengacu pada skema atau serangkaian kebohongan yang menyebabkan seseorang merasa tertipu meskipun apa yang diyakini otentik. Terdapat unsur-unsurnya dalam Pasal 378 KUHP; namun juga terdapat unsur penipuan *online* yang tidak dipertanggungjawabkan dalam ketentuan Pasal 378 KUHP yaitu tidak terpenuhinya faktor media yang digunakan dalam melakukan penipuan *online* yaitu media elektronik yang belum dikenal dalam KUHP atau KUHAP, perbedaan metode penipuan antara penipuan konvensional dan penipuan *online*, dan juga ada batasan yang tidak dipertanggungjawabkan (Kurniawati et al., 2021).

Pasal 28 ayat (1) UU ITE berbunyi sebagai berikut, dan merupakan ketentuan yang relevan untuk tindak pidana penipuan, khususnya di internet:

“Mereka yang dengan sengaja dan melawan hukum menyebarkan berita dan menipu, yang menyebabkan kerugian finansial bagi pelanggan yang melakukan transaksi elektronik.”

Pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pasal 28 ayat (1) UU ITE dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 miliar, sebagaimana tercantum dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE. Pasal 28 ayat (1) dapat digunakan terhadap pelaku penipuan atau penipuan internet meskipun tidak secara langsung mengatur tentang tindak pidana penipuan yang terkait dengan unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal, yaitu “kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”. Maka dari itu pasal tersebut bisa dikenakan kepada seorang pelaku tindak pidana penipuan. Namun jika kedua kondisi untuk kedua pasal tersebut terpenuhi, penyidik dapat menggunakannya secara bergantian, praktik yang dikenal sebagai praktik berlapis. (Ika Pomounda, 2015).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Sila Pancasila kedua sangat penting untuk mencegah krisis kemanusiaan dan melestarikan nilai-nilai kemanusiaan universal. Prinsip ini penting untuk memastikan bahwa hukum diterapkan

secara adil kepada semua orang untuk menghormati hak asasi manusia. Prinsip-prinsip yang digariskan dalam sila kedua akan melindungi hak-hak mereka yang dirugikan akibat praktik investasi ilegal seperti kasus Binomo jika diikuti. Secara hukum, penipuan *online* yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dapat dituntut berdasarkan Pasal 378 KUHP, Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang ITE, dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE pidana.

Penelitian dalam artikel ini lebih lanjut dapat menggali lebih dalam peraturan negara saat ini, yang kiranya dapat dioptimalkan dengan menggunakan nilai-nilai dasar Pancasila, khususnya sila kedua, untuk mengatur kejahatan di dalam kasus penipuan.

Ucapan Terima Kasih

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karna atas KaruniaNya, kami menyelesaikan artikel ini dengan judul Analisis Hukum Pidana dan Nilai Pancasila (Studi Kasus: Aplikasi Binary Option / Binomo). Ucapan terima kasih ini ditulis untuk teman-teman dan dosen pengampu di Universitas Tarumanegara Jakarta yang telah mendukung kami dan memberikan motivasi dan semangat sehingga kami bisa menyelesaikan artikel ini dengan tepat waktu.

REFERENSI

- BPPI. (2021). *Pentingnya Pengamalan Pancasila Sila ke-2 di Lingkungan Masyarakat*. <https://bpip.go.id/berita/991/582/pentingnya-pengamalan-pancasila-sila-ke-2-di-lingkungan-masyarakat.html>
- Gultom, A. F. (2016). Enigma Kejahatan dalam Sekam Filsafat Ketuhanan. *Intizar*, 22(1). <https://doi.org/10.19109/intizar.v22i1.542>
- Hakim, L. (2015). Asas-asas Hukum Pidana. *Syria Studies*, 7(1).
- Ika Pomounda. (2015). Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Melalui Media Elektronik (Suatu Pendekatan Viktimologi). *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 3.
- Kurniawati, E., Permana, D. I., W, A. A. P., & Arrizal, N. Z. (2021). UPAYA HUKUM TERHADAP KORBAN INVESTASI PALSU DI DUNIA MAYA. *Prosiding Conference On Law and Social Studies*.
- Listyaningsih, & Umam, A. N. (2018). Implementasi Sila Kemanusiaan yang Adil Dan Beradab di Sekolah Inklusi SMK Daruttaqwa Suci Manyar Gresik. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 6(2).
- Raditya. (2019). *Sejarah Hari Lahir Pancasila. Peran BPUPKI dan PPKI*. Tirto.
- Rohman, F. (2022). *Kenapa Aplikasi Binomo Ilegal? Ini Penjelasannya*. Katadata.Co.Id. <https://katadata.co.id/agung/berita/624be6e92d627/kenapa-aplikasi-binomo-ilegal-ini-penjelasaannya>
- Singgi, I. G. A. S. K., Suryawan, I. G. B., & Sugiarta, I. N. G. (2020). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Peretasan sebagai Bentuk Kejahatan Mayantara (Cyber Crime). *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2553.334-339>
- Sugandhi, R. (1980). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (1980)*. Surabaya Usaha Nasional.
- Surahmi, M. (2019). Perlindungan Hukum bagi Korban Penipuan Investasi (Studi Kasus di Kota Palembang). *Jurnal Thengkyang*, 2(1). <http://jurnaltengkiang.ac.id/jurnal/index.php/JurnalTengkiang/article/view/19/10>
- Tusyanna, M. N. D. S. K. R. W. S. D. A. (2022). *Analisa atas Aplikasi Trading Binomo (Studi atas Kasus Indra Kenz)*. https://www.researchgate.net/publication/361512183_Analisa_atas_Aplikasi_Trading_Binomo_Studi_atas_Kasus_Indra_Kenz
- Yuliani, D., & Dewi, D. A. (2021). Kesetaraan Hak Warga Negara Dalam Pemaknaan Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. *Jurnal Kajian Ilmu Humaniora*, 1(4).